

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang strategi bertahan hidup buruh yang terkena PHK. Sehingga hal tersebut bisa menjadi pembandingan untuk melihat perbedaan dan persamaan terkait dengan hasil penelitian. Oleh karena itu, berikut penelitian-penelitian terdahulu tentang strategi bertahan hidup buruh terkena PHK :

Penelitian yang dilakukan oleh Simorangkir dan Christien tentang Coping Strategy Tenaga Kerja Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak Covid-19 terhadap semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Dampak pandemi Covid-19 adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya penurunan volume produksi perusahaan yang berdampak pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Lebih dari 3,5 juta pekerja di-PHK selama pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang strategi coping pasca kerja (PHK) karyawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan analisis deskriptif, subyek yang memberikan informasi untuk penelitian ini adalah 5 orang pekerja yang dirumahkan selama wabah Covid-19. Berdasarkan temuan lapangan, strategi bertahan hidup tenaga kerja pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) yaitu: 1. Strategi untuk secara proaktif melakukan diversifikasi usaha bagi karyawan untuk mencari pekerjaan lain/ membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan. 2. Strategi pasif, kurangi pengeluaran rumah tangga dan hiduplah

dengan apa yang Anda miliki. 3. Strategi berjejaring, menggunakan hubungan antar keluarga dan kelompok sosial yang bertetangga (Simorangkir, 2022).

Kedua, penelitian dari Dwi Siti Lestari, tentang Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait pengangguran di Indonesia pasca Covid 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menunggu pendekatan kualitatif dengan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia pasca Covid-19, sebagai berikut; (1) Mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19. (2) Menyelenggarakan program insentif pajak penghasilan dan relaksasi pembayaran kredit. (3) Pemberian bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori rentan dan miskin. (4) Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas. (5) Memperluas kesempatan kerja bagi pekerja yang terdampak pandemi. (6) Pembukaan layanan konsultasi, informasi dan pengaduan bagi pekerja terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja. (7) Penerbitan Kartu Prakerja untuk mengembangkan kompetensi dan kesempatan kerja. Kesimpulan: Pemerintah telah melakukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia pasca Covid-19 (Lestari, 2023).

Ketiga, yakni penelitian dari Hasibuan, Fauziah Sari (2022) Strategi koping perempuan lajang korban PHK saat pandemi COVID-19 di Padang Lawas. Dasar kajian ini adalah tingginya angka PHK selama pandemi COVID-19, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan. Penelitian ini mendeskripsikan kelangsungan hidup wanita single parent yang terkena PHK selama pandemi COVID-19 dan mendeskripsikan strategi coping yang diterapkan oleh para wanita single parenting yang terkena PHK selama pandemi COVID-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan perempuan lajang setelah di-PHK dalam hal kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan masih kurang, sehingga perlu adanya strategi bertahan hidup guna melanjutkan kehidupan sehari-hari. .

Strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh ibu tunggal setelah di-PHK adalah strategi aktif seperti memverifikasi pekerjaan, menambah jam kerja, dan melibatkan anak dalam pekerjaan. Strategi pasif seperti mengubah pola makan, membeli makanan yang tidak mudah busuk, tidak membeli peralatan baru dan baju baru sesering mungkin, dan minum obat secukupnya. Strategi penyambungan yang dilakukan antara lain meminjam uang ke kerabat atau tempat kerja, meminjam uang ke warung, menggunakan bantuan pemerintah untuk orang miskin, dan menggunakan KIP (Hasibuan, 2022).

Penelitian berikutnya yakni dari Nunung Andriani, Muhammad Syukur dengan judul Strategi Survival Masyarakat Korban Phk Di Tengah Kondisi Krisis Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) strategi survival masyarakat korban PHK dalam mempertahankan kehidupan keluarga yang ditanggungnya pada saat kondisi krisis pandemi Covid 19 di Kabupaten Bulukumba dan 2) pilihan pekerjaan yang tersedia dalam mempertahankan keberlangsungan hidup korban PHK di Kabupaten Bulukumba. Penentuan informan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan yaitu penduduk Kabupaten Bulukumba atau yang pernah bekerja di perusahaan PT. Lonsum Balombessie dan mengalami pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai strategi survival masyarakat korban PHK pada masa pandemi covid 19 di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut: 1. Alternatif pilihan yang tersedia disektor pekerjaan baru dalam mempertahankan keberlangsungan hidup para korban PHK di

Kabupaten Bulukumba adalah: a. Bertani, b. Berwirausaha dan c. Buruh Bangunan. 2. Strategi masyarakat korban PHK dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang ditanggungnya pada saat kondisi krisis pandemi Covid 19 di Kabupaten Bulukumba adalah dengan melakukan 3 strategi mekanisme survival yaitu: a. Mengurangi Pengeluaran, b. Memanfaatkan Sumber Daya Yang Ada dan c. Meminta Bantuan Dari Jaringan Sosial. (Andrian, 2023).

Dan yang terakhir, yakni penelitian dari Ege Litra dengan judul “Strategi Adaptasi Bertahan Hidup Mantan Karyawan Pasca Phk (Studi Di Pt. Asia Citra Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir)”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pada tahun 2017 PT. Asia Citra mengalami kebangkrutan (pailit) yang harus melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 1800 orang karyawan dan buruh. Hal ini menyebabkan karyawan kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka terutama masyarakat desa Labuhan Papan yang mayoritas bekerja di PT. Asia Citra. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep dari Suharto tentang strategi adaptasi, didalamnya terdapat tiga poin strategi, yaitu strategi aktif, strategi pasif, dan strategi jaringan sosial. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti di desa Labuhan Papan adalah melakukan strategi oleh Suharto. Strategi aktif yaitu dengan cara mencari pekerjaan sampingan, memanfaatkan seluruh potensi yang ada didalam keluarga untuk menambah pendapatan, dan memanfaatkan alam sekitar. Strategi pasif yaitu dengan cara mengutamakan keperluan yang dianggap penting dan yang terakhir adalah strategi jaringan yaitu dengan melakukan pinjaman uang kepada keluarga atau koperasi jika situasi keuangan keluarga sedang mendesak (Litra, 2022).

Tabel 2.1
Perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Simorangkir dan Christien tentang “Coping Strategy Tenaga Kerja Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Bekasi”.	Fokus dari penelitian Simorangkir dan Christien adalah untuk melihat secara mendalam strategi coping yang dilakukan oleh para pekerja pasca kerja (PHK). Sedangkan dalam penelitian ini, berfokus pada strategi bertahan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
2.	Dwi Siti Lestari, tentang “Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia Pasca Pandemi Covid-19”.	Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Siti Lestari bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah terkait pengangguran di Indonesia pasca Covid 19. Sedangkan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
3.	Hasibuan dan Fauziah Sari, tentang “Strategi Bertahan Hidup Perempuan <i>Single parent</i> Korban Pemutusan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Padang Lawas”	Dalam penelitian Hasibuan dan Fauziah Sari, berfokus pada kelangsungan hidup perempuan <i>single parent</i> yang terkena PHK selama pandemi COVID-19 dan menjelaskan strategi penanggulangan yang diterapkan oleh perempuan <i>single parent</i> yang terkena dampak PHK selama pandemi COVID-19. Sedangkan, dalam penelitian ini berfokus pada korban PHK Pabrik yang ada di Gresik.
4.	Nunung Andriani, Muhammad Syukur, Strategi Survival Masyarakat Korban Phk Di Tengah Kondisi Krisis Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Bulukumba	Dalam penelitian Nunung Andriani berfokus pada strategi masyarakat ditengah pandemi covid. Akan tetapi dalam penelitian ini fokus peneliti bukan hanya pada masa pandemi, dan juga bukan ke ranah masyarakat, namun ke unit yang lebih kecil yakni keluarga korban PHK.
5.	Ege Litra (2022) Strategi Adaptasi Bertahan Hidup Mantan Karyawan Pasca Phk (Studi Di Pt. Asia Citra Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir)	Dalam penelitian Ege Litra beliau menjelaskan mengapa karyawan mengalami PHK, dan bagaimana strategi para karyawan di satu perusahaan yang terkena PHK. Bedanya, dalam penelitian ini bukan hanya berfokus pada satu perusahaan, namun secara global, dan mencakup beberapa perusahaan yang berbeda.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, Tahun 2023

B. Konsep Hubungan Kerja

Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dengan majikan, yang mana hubungan tersebut hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak

yang pada pokoknya menggambarkan hak-hak dan kewajiban buruh terhadap majikan, dan sebaliknya. Hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Menurut pasal 1 angka 15 UU No. 13/2003 bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sedangkan menurut pasal 50 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa adanya hubungan kerja adalah setelah terjadinya perjanjian kerja dimana pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan atau pengusaha dengan menerima upah dan majikan/pengusaha juga menyatakan kesanggupannya untuk memberikan pekerjaan kepada buruh dengan membayar upah (Irsan, 2016).

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara buruh dan majikan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dan memberi upah.

Adapun hubungan kerja pada dasarnya meliputi :

- a. Pembuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya suatu hubungan-kerja
- b. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau dibawah pimpinan majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan dari buruh
- c. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh sekaligus merupakan hak buruh atas upah
- d. Berakhirnya hubungan kerja

- e. Caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

C. Pemutusan Hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja yang disebut juga PHK adalah awal dari hilangnya pekerjaan seorang pekerja atau awal dari ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi dirinya dan keluarganya.

Menurut pasal 1 angka 25 UU No. 13/2003 menyatakan bahwa definisi Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah masalah yang bisa timbul dalam keseharian kita. Dalam berbagai kasus, PHK menjadi penyulut konflik hubungan industrial antara buruh dengan pengusaha (Toha, 1987).

Pemutusan hubungan kerja dapat dibagi menjadi 4 golongan sebagai berikut :

1. Hubungan Kerja Yang Putus Demi Hukum

Hubungan kerja putus demi hukum berarti putus dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya tindakan salah satu pihak, buruh atau majikan, yang ditujukan untuk itu.

2. Hubungan Kerja Yang Diputuskan Oleh Pihak Buruh

Karyawan memiliki hak penuh untuk memutuskan hubungan kerja dengan persetujuan pemberi kerja dan ini dapat dilakukan kapan saja. Dalam hal ini, kedua bagian tersebut berdiri sendiri. Selain itu, karyawan memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa persetujuan pemberi kerja.

3. Hubungan Kerja Yang Diputuskan Oleh Majikan

Pemberhentian kerja oleh majikan diatur dalam UU No. 12 Tahun 1969. UU ini diundangkan untuk lebih menjamin ketenteraman dan keamanan bagi para pekerja. Tujuan

undang-undang ini adalah untuk membebaskan pekerja Indonesia dari ketakutan akan kehilangan pekerjaan secara sewenang-wenang.

4. Hubungan Kerja Yang Diputuskan Oleh Pengadilan, Terutama Berdasarkan Alasan Penting.

Pemberhentian oleh pengadilan adalah pemberhentian pengadilan perdata hukum umum atas permintaan pihak yang terlibat karena alasan penting. Alasan signifikan selain urgensi, perubahan keadaan pribadi atau kekayaan pemohon atau pihak lain, atau perubahan keadaan perilaku bisnis adalah sifat yang cocok untuk penghentian segera, secara instan. hubungan kerja jangka pendek.

D. Konsep Problem Sosial

Menurut ilmu sosiologi menjelaskan bahwa problem sosial adalah ketidak sesuaian antar unsur-unsur dalam kebudayaan atau masyarakat, yang dapat membahayakan hidupnya kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok dari warga kelompok sosial, sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Problem sosial dapat diklasifikasikan menurut sumber-sumbernya yaitu faktor ekonomi, biologi, biopsikologis, dan kebudayaan yang kaitannya sebagai berikut:

1. Problem sosial yang berkaitan dengan faktor ekonomi diantaranya ada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.
2. Problem sosial yang berkaitan dengan faktor biologi diantaranya ada wabah penyakit tertentu, seperti virus HIV, H5N1 dan SARs.
3. Problem sosial yang berkaitan dengan faktor psikologi diantaranya termasuk penyakit saraf (neurosis), bunuh diri dan disorganisasi jiwa.

4. Problem sosial yang bersumber pada aspek kebudayaan diantaranya seperti perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak remaja, konflik rasial, dan keagamaan.

Diantara klasifikasi problem sosial diatas, beberapa problem sosial yang penting diantara lain seperti kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga (perpecahan dalam keluarga), masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran dalam norma-norma masyarakat, masalah kependudukan (tingkat pertumbuhan dan pengurangan jumlah penduduk), masalah lingkungan hidup, masalah gender, serta fenomena aliran sesat (Setiadi & Kolip, 2011).

Sedangkan mengutip pandangan dari Soerjono Soekanto (2012), beliau menyatakan bahwa problem sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Sedangkan menurut Blackmar dan Billin (1923) menyatakan bahwa masalah sosial adalah ketidakmampuan atau kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur dan intuisi sosial melakukan sesuatu bagi perkembangan kepribadian. Yang kemudian pada pembagiannya dibagi menjadi 3 bentuk problem sosial, antara lain sebagai berikut:

- a. Konflik dan kesenjangan, seperti kemiskinan, kesenjangan, konflik antar kelompok, pelecehan seksual, dan masalah sosial.
- b. Perilaku menyimpang, seperti kecanduan obat terlarang, gangguan mental, kejahatan, kenakalan remaja, dan kekerasan pergaulan.
- c. Perkembangan manusia, seperti masalah keluarga, usia lanjut, kependudukan (seperti urbanisasi), dan kesehatan seksual.

E. Konsep Strategi Bertahan Hidup

Menurut Sondang Siagian konsep strategi yaitu salah satu cara yang nantinya digunakan bagi manajemen puncak untuk menghadapi segala perubahan yang akan terjadi, baik yang sifatnya eksternal hingga internal dalam konteks organisasi. Bertahan hidup adalah kondisi dimana ketika individu atau kelompok yang memiliki kehidupan normal (masih sebagaimana direncanakan) baik kemudian berubah secara sadar maupun tanpa kita sadari masuk ke situasi yang tidak normal atau diluar kendali. Secara general strategi bertahan hidup adalah sebagai kesanggupan setiap individu dalam mempergunakan semua cara untuk mengatasi berbagai masalah yang nantinya hadir didalam hidupnya (Simanjuntak, 2018).

Menurut Suharto (Damayanti, 2021) strategi bertahan hidup adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan serangkaian cara untuk mengatasi berbagai masalah yang melingkupi hidupnya. Strategi pemecahan masalah ini pada dasarnya adalah kemampuan semua anggota keluarga untuk mengelola semua aset mereka. Strategi bertahan hidup adalah serangkaian upaya yang digunakan oleh seseorang dan keluarga kelas menengah dan menengah bawah dalam ekonomi sosial sesuai standar. Melalui strategi yang dilakukan oleh satu orang dimungkinkan untuk meningkatkan pendapatan dengan menggunakan sumber lain atau mengurangi pengeluaran dengan mengurangi kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan hidup mengadopsi model kerja ganda, yang merupakan bagian dari strategi ekonomi (Damayanti, N., 2021).

Menurut Suharto (Winarno, 2016) mengungkapkan bahwa strategi bertahan hidup dalam menyiasati perubahan dan tekanan ekonomi dapat diatasi dengan melakukan berbagai strategi. Melalui strategi yang dilakukan oleh seseorang, bisa menambah penghasilan lewat pemanfaatan sumber-sumber yang lain ataupun mengurangi pengeluaran lewat pengurangan kuantitas dan kualitas barang atau jasa. Selain itu, strategi bertahan hidup menerapkan pola

nafkah ganda yang merupakan bagian dari strategi ekonomi. Jadi strategi bertahan hidup dalam konteks penelitian ini diartikan adalah dalam menompang pada aspek ekonomi, dengan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki, melakukan penghematan dengan mengurangi pengeluaran yang meliputi pengurangan total konsumsi, merubah pola konsumsi, strategi ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Strategi bertahan hidup dapat digolongkan menjadi 3 kategori yaitu strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan. Berikut merupakan penjelasan secara singkat berkaitan dengan strategi bertahan hidup :

1. Strategi Aktif

Strategi ini merupakan upaya dalam mempertahankan hidup dengan melakukan pemanfaatan dengan melihat segala potensi yang dimiliki. Strategi ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah rumah tangga berkaitan dengan ekonomi seperti dengan menambah pemasukan hingga menambah jam kerja untuk bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Dengan memaksimalkan sumber daya dan potensi untuk bertahan hidup untuk mendorong kemajuan dari ekonomi keluarga.

2. Strategi Pasif

Untuk strategi pasif ini dapat dipahami bahwa keluarga maupun individu melakukan strategi untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara melakukan pengeluaran seminimal mungkin. Menurut pendapat Suharto (2009) yang mengemukakan bahwa strategi pasif adalah strategi bertahan hidup dengan cara mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya biaya untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya). Dengan kata lain strategi pasif merupakan sikap bertahan hidup dengan melakukan pengeluaran secara selektif serta tidak melakukan pemborosan.

3. Strategi Jaringan

Selanjutnya adalah strategi jaringan dalam hal ini merupakan cara yang dilakukan yaitu memanfaatkan jaringan sosial individu maupun keluarga. Menurut Suharto (2009) strategi jaringan merupakan strategi untuk bertahan hidup dengan menjalin hubungan sosial baik yang dilakukan secara formal dan informal dengan lingkungan sosialnya hingga lingkungan kelembagaan. Dengan kata lain strategi jaringan ini berarti upaya untuk meminta bantuan dari orang lain baik dalam hal materi maupun lainnya dengan memanfaatkan jaringan sosialnya baik kepada rekan-rekan, tetangga sekitar hingga relasi lainnya secara informal maupun formal hal ini dilakukan ketika memiliki kesulitan yang tidak bisa dipecahkan (Winarno, 2016).

F. Teori Kebutuhan Dasar (Maslow)

Manusia memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi secara memuaskan melalui proses homeostatis, baik fisiologis maupun psikologis. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat penting, berguna atau diperlukan untuk mempertahankan homeostatis dan kehidupan. Banyak filsuf, psikolog, dan ahli fisiologi menggambarkan kebutuhan manusia dari sudut yang berbeda. Aristoteles adalah orang pertama yang menjelaskan kebutuhan manusia. Sekitar tahun 1950, Abraham Maslow, seorang psikolog Amerika, mengembangkan teori kebutuhan dasar manusia yang dikenal dengan Basic Human Needs System (Mubarak, 2007). Hierarki meliputi lima jenis kebutuhan dasar, yaitu:

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiologic Needs*).

Kebutuhan fisiologis memiliki prioritas tertinggi dalam hirarki Maslow. Secara umum, seseorang dengan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi akan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan fisiologisnya daripada yang lain. Misalnya, seseorang yang

kekurangan makanan, keamanan, dan cinta akan sering berusaha memuaskan kebutuhannya akan cinta. Kebutuhan fisiologis mutlak diperlukan untuk keberadaan manusia. Manusia memiliki delapan jenis kebutuhan, yaitu:

- a. Kebutuhan oksigen dan pertukaran gas
- b. Kebutuhan cairan dan elektrolit
- c. Kebutuhan makanan
- d. Kebutuhan eliminasi urine dan alvi
- e. Kebutuhan istirahat dan tidur
- f. Kebutuhan aktivitas
- g. Kebutuhan kesehatan temperatur tubuh

2. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman (*Safety and Security Needs*).

Kebutuhan keselamatan dan rasa aman yang dimaksud adalah aman dari berbagai aspek baik fisiologis, maupun psikologis. Kebutuhan ini meliputi : kebutuhan perlindungan diri dari udara dingin, panas, kecelakaan, dan infeksi. Bebas dari rasa takut dan kecemasan, dan Bebas dari perasaan terancam karena pengalaman yang baru atau asing.

3. Kebutuhan Rasa Cinta, memiliki dan dimiliki (*Love and Belonging Needs*).

Kebutuhan tersebut antara lain:

1. Memberi dan menerima kasih sayang,
2. Perasaan memiliki dan hubungan yang bermakna dengan orang lain,
3. Persahabatan,
4. Mendapatkan status atau pengakuan dalam lingkungan keluarga, kolektif dan sosial.

4. Kebutuhan Harga Diri (*Self-esteem Needs*).

Kebutuhan ini meliputi perasaan tidak bergantung pada orang lain, kompeten, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Need for Self Actualization*).

Kebutuhan ini meliputi :

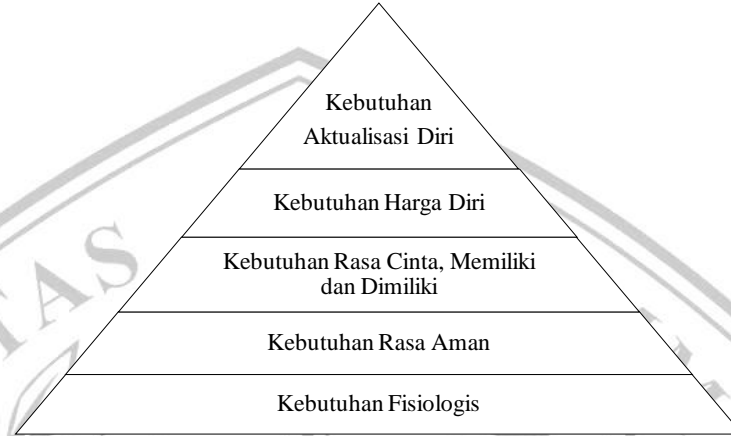
- a. Dapat mengenal diri sendiri dengan baik (mengetahui dan memahami potensi diri)
- b. Belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri
- c. Tidak emosional
- d. Mempunyai dedikasi yang tinggi
- e. Kreatif
- f. Mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan sebagainya.

Mengetahui konsep dasar kebutuhan menurut Maslow, kita harus memahami bahwa manusia selalu berkembang untuk dapat mencapai potensi maksimalnya. Jika seseorang merasa puas, mereka akan menikmati kebahagiaan dan bebas berkembang menuju potensi yang lebih besar. Sebaliknya, jika proses pemenuhan kebutuhan terganggu maka akan timbul kondisi patologis. Dalam konteks homeostatis, masalah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengganggu pemenuhan kebutuhan dan kondisi tersebut selanjutnya dapat mengancam homeostatis fisiologis dan psikologis seseorang.

Oleh karena itu, ketika memahami konsep kebutuhan dasar manusia dari Maslow, orang akan memiliki persepsi yang sama bahwa untuk naik ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, kebutuhan dasar berikut ini harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini adalah tingkat kebutuhan yang lebih tinggi yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya terpenuhi. Misalnya, jika kebutuhan fisiologis seseorang seperti makanan, cairan, istirahat, dll. tidak

puas, ia tidak dapat memuaskan kebutuhannya akan harga diri atau aktualisasi diri dengan mengabaikan kebutuhan pertama (Stevens, P.J.M, dkk, 2000).

Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan dasar Manusia Maslow



Sumber : (Stevens, P.J.M, dkk, 2000)

G. Konsep Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anak-anaknya, atau ibu dan anaknya. Keluarga adalah tempat yang penting, dimana anak memperoleh dasar dalam membentuk kemampuannya agar kelak menjadi orang yang berhasil di masyarakat. Menurut Gunarsa (2000), keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan sosial, terutama pada tahap awal perkembangan, merupakan dasar pembentukan kepribadian setelah itu.

Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan [darah](#), hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu [kebudayaan](#).

Keluarga adalah sekelompok orang yang terikat oleh perkawinan, darah, atau adopsi, hubungan antara suami dan istri adalah perkawinan, dan hubungan antara orang tua dan anak biasanya dengan darah dan kadang-kadang diadopsi. Menurut Sayekti Pujosuwarno, keluarga adalah ikatan perkumpulan yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau perempuan yang hidup sendiri dengan atau tanpa anak, anak tiri atau anak angkat dan tinggal dalam satu rumah tangga. Keluarga menurut Partini (Ulfiyah, 2016) adalah sekelompok orang yang meliputi suami, istri, anak-anak (jika ada) yang masih berhubungan atau belum menikah. Sedangkan dalam UU Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Dewan Perkawinan BP4 (1992), keluarga adalah unit sosial terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak.

Dari berbagai pengertian keluarga di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat atau keluarga adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang memiliki hubungan darah dan perkawinan. mengurus kepala rumah tangga, saling berinteraksi, setiap anggota keluarga menjalankan perannya masing-masing, yang mampu menciptakan dan memelihara budaya.

2. Peran Keluarga

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedang peranan adalah bagian tugas utama yang harus dilaksanakan (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*).

Suatu keluarga terdiri dari pribadi-pribadi yakni ayah, ibu dan anak-anak sebagai keluarga batih/inti. Dalam keluarga besar masih ada pribadi-pribadi lain seperti kakek, nenek, paman dan lain-lain. Setiap anggota keluarga hendaknya mengetahui perannya masing-masing dan menjelaskannya. Setiap anggota keluarga juga harus aktif menciptakan hubungan dalam

keluarga, dan anak dapat tumbuh kembang secara wajar. Peran keluarga tercermin dari status masing-masing anggota keluarga, baik status orangtua, anak-anak maupun status sebagai bagian dari masyarakat.

3. Fungsi Keluarga

Adapun fungsi-fungsi keluarga dalam buku “Buku ajar kebutuhan dasar manusia” (Mubarak & N. Chayatin, 2007) antara lain :

a. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi mencakup kegiatan melanjutkan keturunan secara terencana, sehingga menunjang terciptanya kesinambungan dan kesejahteraan sosial.

b. Fungsi Afeksi

Fungsi afeksi meliputi kegiatan untuk menumbuh kembangkan hubungan sosial dan kejiwaan yang diwarnai kasih sayang, ketentraman dan kedekatan antar anggotanya.

c. Fungsi Perlindungan

Fungsi ini mencakup kegiatan yang dimaksudkan untuk mewaspadaai anggota keluarga terhadap situasi atau tindakan yang dapat membahayakan atau menghambat kelangsungan hidupnya, serta menjaga pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga secara wajar.

d. Fungsi Pendidikan

Fungsi ini meliputi kegiatan peningkatan kemampuan serta sikap dan perilaku anggota keluarga untuk mendukung proses terciptanya kehidupan dan penghidupan keluarga yang sejahtera.

e. Fungsi Keagamaan

Fungsi Keagamaan memainkan peranan yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan hubungan anggota keluarga dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarga dapat menjadi wahana persemaian nilai-nilai keagamaan, guna membangun jiwa anggota keluarga yang beriman dan bertaqwa.

f. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi sosial budaya meliputi kegiatan yang ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, memperkaya khasanah budaya, dan mengintegrasikan ke dalam masyarakat nasional dalam kerangka masyarakat nasional.

g. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi meliputi kegiatan yang ditujukan untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai sosial/kebersamaan di antara anggota keluarga agar tercipta suasana keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Melalui sosialisasi keluarga, anak dapat belajar berpikir, berbicara dan mengikuti adat/kebiasaan, perilaku dan nilai-nilai masyarakat dimana mereka tinggal.

h. Fungsi Pengembangan Lingkungan

Fungsi Pengembangan Lingkungan meliputi kegiatan yang memberdayakan anggota keluarga untuk melestarikan, memberdayakan, dan meningkatkan daya dukung lingkungan, baik fisik maupun sosial, untuk menciptakan keharmonisan antara kehidupan alam dan manusia.

i. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi meliputi kegiatan mata pencaharian, perencanaan perbaikan pemeliharaan, dan distribusi pendapatan keluarga untuk menciptakan kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan.

j. Fungsi Rekreatif

Fungsi rekreatif meliputi kegiatan mengisi waktu senggang secara positif guna menciptakan suasana santai diantara keluarga, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pendayagunaan energi fisik dan psikis, menghilangkan kecemasan kekecewaan dan menciptakan ketentraman psikis.

k. Fungsi Kontrol Sosial

Fungsi kontrol sosial meliputi kegiatan untuk menghindarkan anggota keluarga dari perilaku menyimpang serta membantu mengatasinya guna menciptakan suasana kehidupan keluarga dan masyarakat yang tertib, aman dan tentram.

Apabila keluarga tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi diatas, maka keluarga beserta anggota akan menagalami gangguan dalam pertumbuhan fisik, intelektual, sosial, emosional atau moralnya. Keluarga akan membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Bahkan apabila orangtua atau keluarga dengan sengaja melalaikan tanggung jawabnya (tidak melaksanakan fungsinya) maka kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anak akan dicabut, yang kemudian akan diserahkan pada orang atau suatu badan sebagai pengganti wali bagi anaknya (Mubarak & N. Chayatin, 2007).

4. Peran Keluarga Dalam Masyarakat

Keluarga dalam kerangka sosial merupakan bagian dari unit masyarakat. Keluarga bertindak sebagai penghubung antara anggotanya dan struktur yang lebih besar (masyarakat). Dalam suatu masyarakat, keluarga berperan sebagai wali sosial, pelindung material bagi anggotanya dalam pembentukan keberlangsungan masyarakat, tempat sosialisasi anak, dan sekaligus sebagai kontrol sosial. Peranan yang harus dilakukan olen keluarga di lingkungan masyarakat adalah :

- a. Melahirkan kelompok (generasi) muda memenuhi segala kebutuhan generasi muda dalam menciptakan masyarakat baru.
- b. Menyampaikan informasi, nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat pada generasi muda
- c. Menyeleksi nilai, norma dan informasi baru bagi generasi muda.
- d. Menyiapkan generasi muda dalam memasuki lingkungan masyarakat.

H. Konsep Kesejahteraan Sosial

Menurut PBB melalui pertemuan para ahli kesejahteraan sosial pada bulan Agustus 1967 merumuskan kembali pengertian kesejahteraan sosial yang pernah dibuat pada tahun 1957 yang menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu fungsi terorganisasi dari kumpulan kegiatan-kegiatan yang dimaksud untuk memungkinkan individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas menanggulangi masalah sosial yang diakibatkan oleh perubahan kondisi-kondisi (Mubarak, 2007).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah rohaninya sosial yang sebaik-baiknya bagi diri keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Arthur Dunham dalam (Sumarnonugroho, 2011) memberikan pemahaman tentang kesejahteraan, Ia mendefinisikan bahwa kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial (Armandita, 2011).

Sedangkan Ponsioen dalam *Social Welfare Policys* mengatakan bahwa istilah sosial mempunyai dua arti : Pertama, diartikan sebagai suatu indikasi dari pada kehidupan bersama makhluk manusia misalnya dalam kebersamaan rasa, berpikir, bertindak dan dalam hubungan antar manusia. Kedua, sejak abad 19, istilah sosial mempunyai konotasi yang berbeda, lebih sentimental dan karena itu agak menjadi kabur, seperti beberapa istilah yang serupa dikaitkan dengan persoalan kemiskinan yang dan keterlantaran contohnya pekerjaan sosial pelayanan sosial aksi sosial dan semacamnya namun kemudian konotasi tersebut berkembang ke arah yang berkaitan dengan pembaharuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Dari berbagai ragam batasan tentang kesejahteraan sosial di atas pada intinya ada yang memandang sebagai suatu program atau tindakan dan ada yang memandang sebagai suatu kondisi. Namun secara garis besar kesejahteraan sosial merupakan suatu tatanan dimana masyarakat berada pada tingkatan yang ideal artinya kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan, *psychologist*, biologis, jaminan rasa aman, tenang, tentram dapat terpenuhi sesuai dengan nilai dan kaidah yang berlaku.

Menurut Zastrow (2017) juga menambahkan bahwa istilah kesejahteraan sosial memiliki dua makna yang berbeda, yakni sebagai institusi atau lembaga dan juga sebagai sebuah disiplin ilmu. Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk terpenuhinya syarat-syarat sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasional dari individu-individu dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial untuk semua

kelompok lapisan masyarakat, baik kelompok kaya maupun miskin. Ketika institusi-institusi dalam masyarakat, seperti keluarga dan ekonomi pasar mengalami kegagalan untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan individu atau kelompok dalam masyarakat, maka pelayanan sosial adalah menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan (Sukmana, 2022).

Dalam pandangan Pierson (2007), konsep kesejahteraan (*welfare*) minimal memiliki tiga sub-kategori, yaitu: (1) Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare*), yakni yang berkaitan dengan penerimaan secara kolektifitas kesejahteraan; (2) Kesejahteraan Ekonomi (*economic welfare*), yakni berkaitan dengan penyediaan aktivitas pasar atau ekonomi formal dalam rangka jaminan sosial keamanan; dan (3) Kesejahteraan Negara (*State welfare*), yakni berkaitan dengan bagaimana institusi-institusi dan agen-agen negara dalam memberikan jaminan pelayanan kesejahteraan sosial (Sukmana, 2022).

Mengacu kepada pandangan Ambrosino (2008), bahwa definisi Kesejahteraan Sosial memiliki makna yang luas, di dalamnya mencakup semua bentuk respons masyarakat yang terorganisir yang mempromosikan kesejahteraan sosial. Dimensi ini mencakup pendidikan, kesehatan, rehabilitas, layanan perlindungan untuk orang dewasa dan anak-anak, bantuan publik, asuransi sosial, layanan untuk mereka yang cacat fisik dan mental, program pelatihan kerja, konseling pernikahan, psikoterapi, konseling kehamilan, adopsi, dan berbagai kegiatan lainnya yang dirancang untuk mempromosikan kesejahteraan sosial (Sukmana, 2022).

Dalam konteks Indonesia, pengertian Kesejahteraan Sosial dapat merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana kesejahteraan sosial dirumuskan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.

Secara umum kesejahteraan sosial bertujuan untuk terciptanya kondisi kehidupan manusia yang layak. Kesejahteraan Sosial memiliki dua tujuan utama, yakni: (1)Tercapainya kehidupan yang sejahtera dalam hal tercapainya taraf hidup dasar seperti sandang, papan, gizi, kesehatan dan hubungan sosial yang serasi dengan lingkungan hidup. (2)Untuk mengeksplorasi sumber-sumber, dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan standar hidup yang memuaskan, dll dan untuk mencapai hubungan yang sangat baik dengan masyarakat sekitar.

Fungsi kesejahteraan sosial adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi *social negative* akibat pembangunan serta terciptanya kondisi-kondisi yang mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Secara umum fungsi-fungsi kesejahteraan sosial meliputi fungsi: Pencegahan (*Preventive*), Penyembuhan (*Curative*), Pengembangan (*Development*), Dan Penunjang (*Support*). Penjelasan ke-empat fungsi tersebut adalah sebagai berikut (Fahrudin, 2012):

- a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*). Kesejahteraan sosial bertujuan untuk membantu individu, keluarga dan masyarakat menghindari masalah sosial yang muncul. Dalam masyarakat dalam masa transisi, upaya pencegahan berfokus pada kegiatan yang dirancang untuk membantu menciptakan jenis hubungan sosial baru dan lembaga sosial baru.
- b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*). Perlindungan sosial bertujuan untuk menghilangkan disabilitas fisik (cacat fisik), mental (cacat emosional) dan sosial (cacat sosial) agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat. Fungsi ini termasuk fungsi pemulihan (rehabilitasi).

- c. Fungsi Pengembangan (*Development*). Kesejahteraan sosial, membantu memberikan kontribusi secara langsung atau tidak langsung dalam proses membangun atau mengembangkan tatanan dan sumber daya sosial di masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*Support*). Fungsi ini mencakup kegiatan yang membantu tercapainya tujuan bidang pelayanan sosial atau bidang kesejahteraan sosial lainnya.

